



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Bahan Direktorat Jenderal Migas

Pada Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII
DPR RI dengan Direktur Jenderal Migas



Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

Jakarta, 4 April 2023



www.migas.esdm.go.id



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas



@halomigas



Halo Migas Ditjen Migas



Contact Center ESDM 136

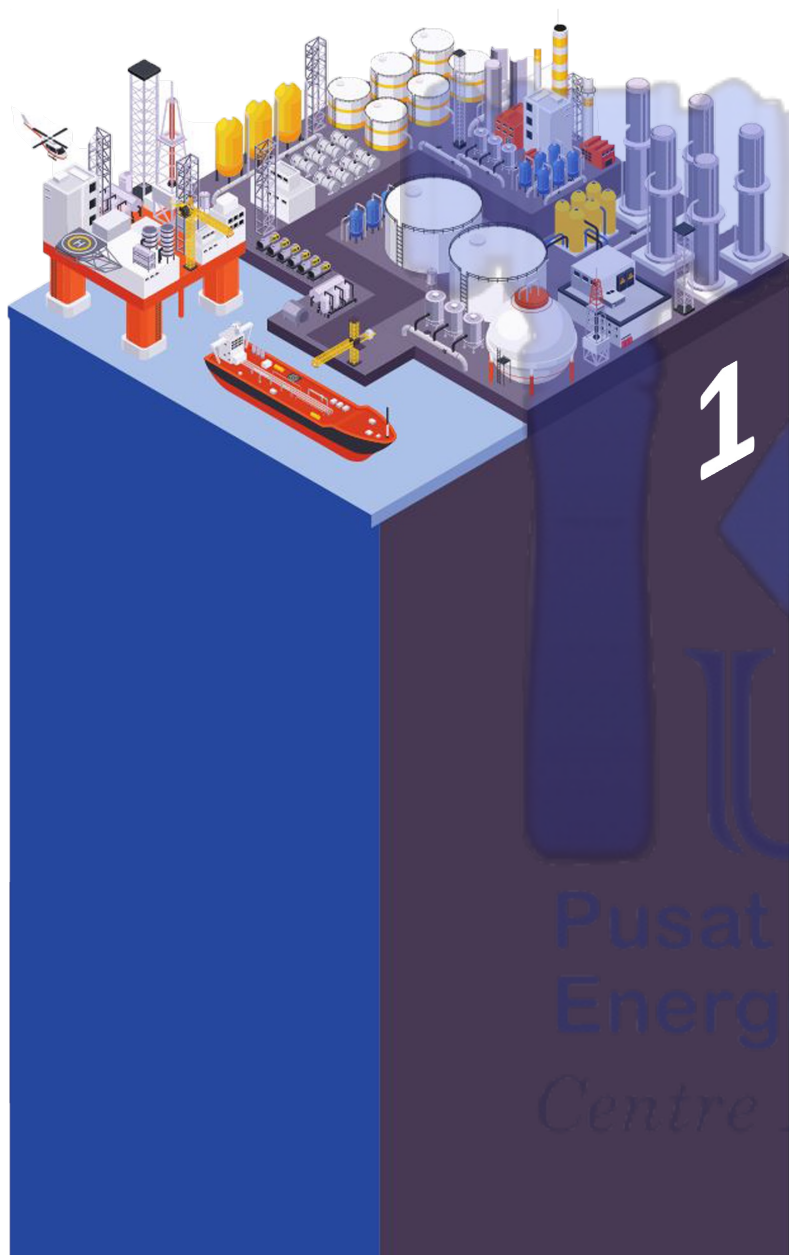
AGENDA

1. Progress Pembangunan Pipa Gas Bumi Cisem Tahap I dan Rencana Tahap II
2. Progress Pembahasan Tata Cara Penetapan Pengguna HGBT di Bidang Industri

3

10

USHEP
Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies



1

Progress Pembangunan Pipa Gas Bumi Cisem Tahap I dan Rencana Tahap II

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

I. Pendahuluan

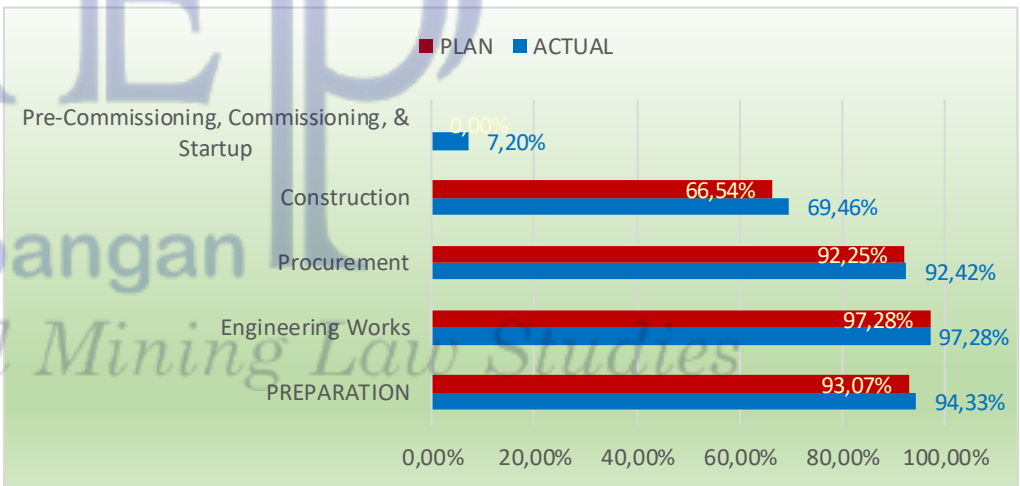
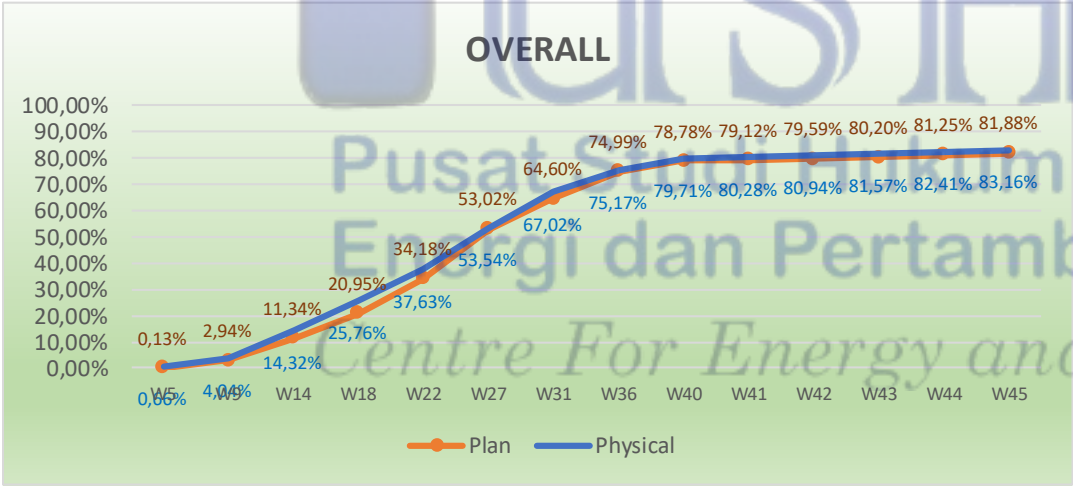
1. Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang (CISEM) terbagi atas 2 (dua) Ruas Pipa yaitu:
 - i. CISEM Tahap I (ruas Semarang – Batang) sepanjang ± 60 km.
 - ii. CISEM Tahap II (ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) sepanjang + 240 km.
2. CISEM Tahap I:
 - i. Status saat ini sedang proses konstruksi selama 15 bulan dan dilaksanakan dengan mekanisme penganggaran *Multi Years Contract* (MYC), yang telah dimulai pada bulan Mei tahun 2022 dan akan selesai pada bulan Agustus tahun 2023.
 - ii. Progress saat ini telah mencapai 83,16% dari rencana 81,88%.
3. CISEM Tahap II:
 - i. Pipa CISEM Tahap II diusulkan untuk dibangun dengan penganggaran APBN secara MYC TA 2023 – 2025.
 - ii. Status saat ini sedang proses pengusulan anggaran ke DJA, Kementerian Keuangan.
4. Pipa transmisi gas bumi CISEM diharapkan dapat memfasilitasi tersedianya kebutuhan gas untuk industri dan rumah tangga di Pulau Jawa, khususnya untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan kebutuhan industri di wilayah Jawa Barat.
5. Sedangkan pasokan gas bumi pipa CISEM akan berasal dari lapangan Jambaran Tiung Biru, Wilayah Kerja Blora dan Long Term Plan (LTP) WK Cepu (lapangan Cendana – Alas Tua) dan WK Tuban (lapangan Sumber-2).

Status Progress Overall Tahap I

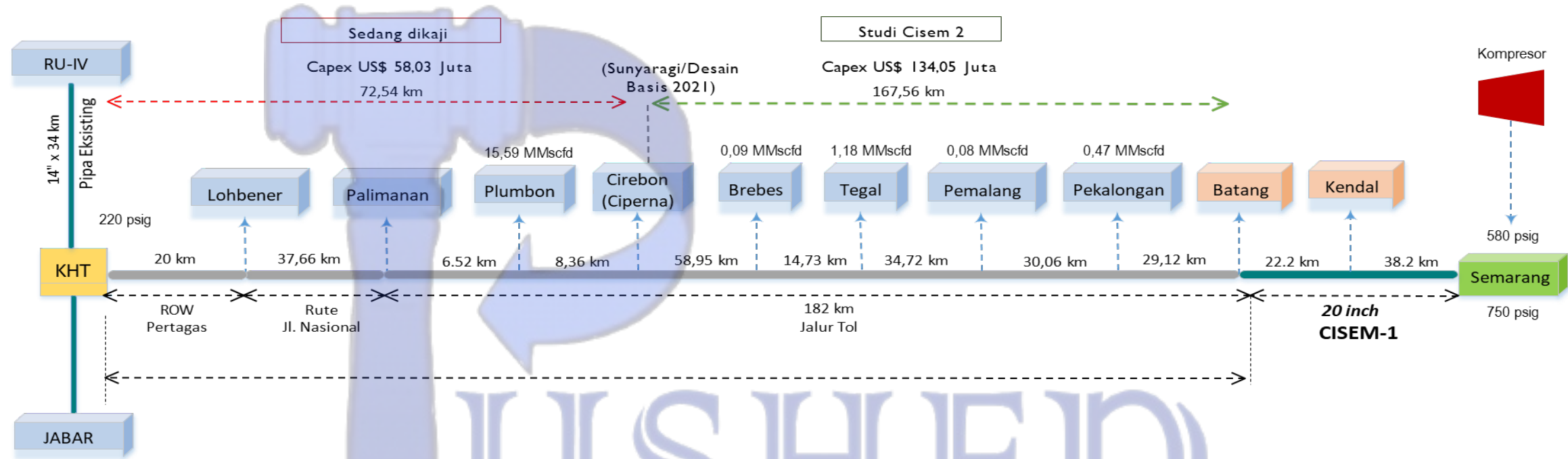
Keseluruhan aktual progress cut off 29 Mar 2023 adalah 83,16% dari rencana 81,88%, variance 1,28%.

Perolehan progress tersebut dari Preparation 94,33%, Engineering 97,28%, Procurement 92,42% dan Kontruksi 69,46%

No	DESCRIPTION	Plan			Actual			Variance %
		Previous Week	To Date	Acc To Date	Previous Week	To Date	Acc To Date	Plan
	PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON SEMARANG TAHAP 1	81,25%	0,63%	81,88%	82,41%	0,75%	83,16%	1,28%
1	PREPARATION	93,03%	0,04%	93,07%	93,52%	0,81%	94,33%	1,26%
2	Engineering Works	97,28%	0,00%	97,28%	97,28%	0,00%	97,28%	0,00%
3	Procurement	92,04%	0,21%	92,25%	92,26%	0,16%	92,42%	0,17%
4	Construction	65,18%	1,36%	66,54%	67,90%	1,56%	69,46%	2,92%
5	Pre-Commissioning, Commissioning, & Startup	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,20%	7,20%	7,20%



Rencana Pipa Transmisi Gas Bumi CISEM Tahap II (Batang – Cirebon – KHT)



Usulan Anggaran (Multiyears Contract):

Uraian	Rp miliar		
	2023	2024	2025
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan	6,000	-	-
2. Konsultan Manajemen Konstruksi	11,895	39,650	27,755
3. Biaya Pemeliharaan Lahan Lokasi Kerja Sama (Tol) dan Pembelian Lahan LBCV (non Tol)	80,000	-	-
4. Pembangunan	475,800	1.586,000	1.110,200
Total	573,695	1.625,650	1.137,955
Grand Total	3.337,300		



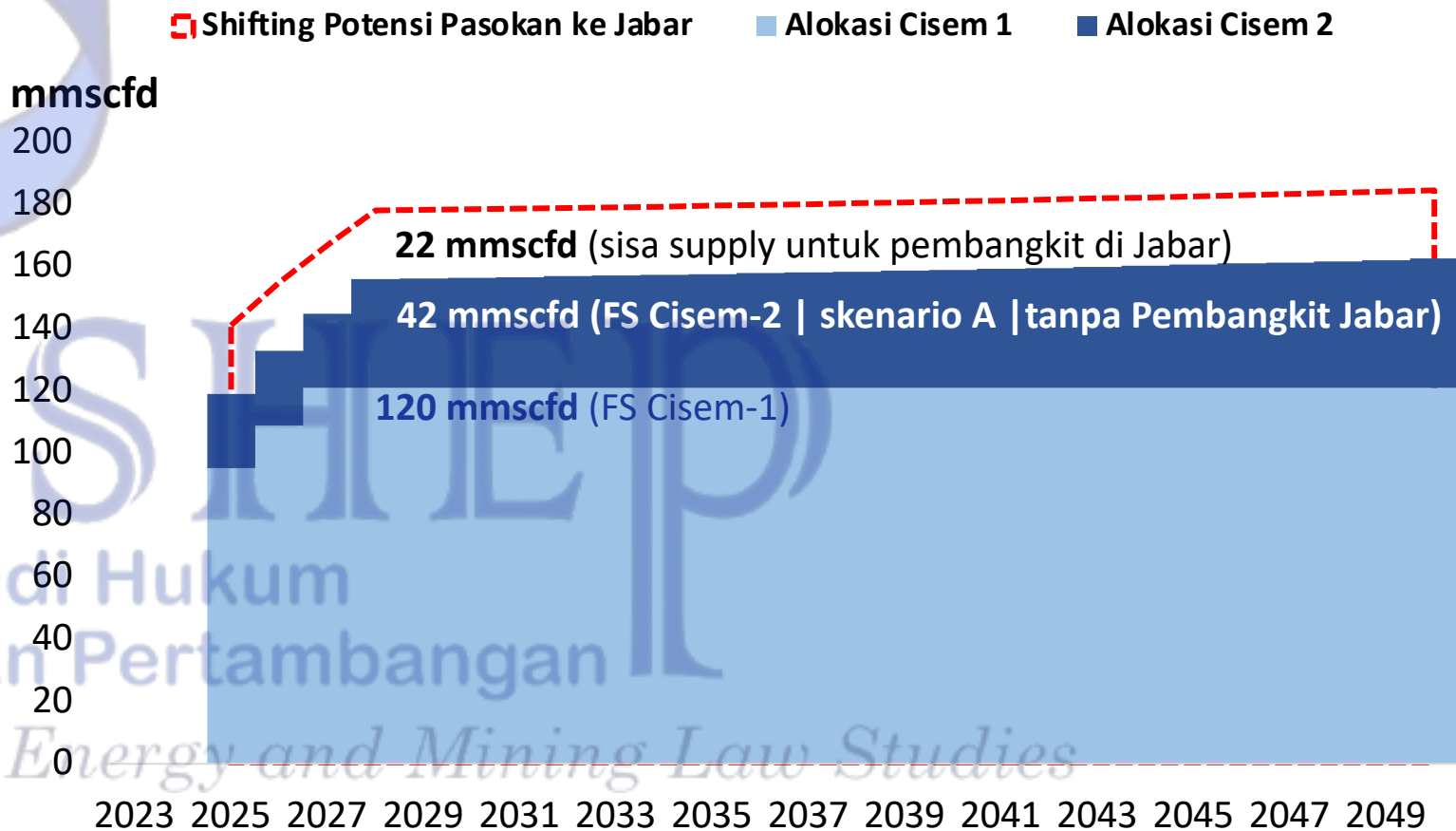
Update jalur pipa Cisem-2 dari titik akhir di Sunyaragi menjadi ke KHT

1. Karena anchor demand dari Kilang Balongan dan peluang untuk integrasi pipa sepanjang Jawa ke Sumatera, maka perlu update tambahan jalur Cisem-2.
2. Demand Kilang Balongan sebesar 24 mmscf/d dan potensi meningkat hingga 42 mmscf/d. Jika menggunakan pipa existing Sunyaragi-Mundu yang berukuran 8 inch, maka pasokan maksimal ke Balongan hanya sekitar 20 mmscf/d.
3. Jika memakai Jalur Sunyaragi-Mundu → jalur padat dan berdasarkan hasil survey diketahui bahwa jalur pipa tersebut banyak yang berada dibawah rumah warga sehingga tidak memungkinkan kedepannya utk penambahan kapasitas pipa melalui metode loop.
4. Dengan merubah jalur menjadi hingga KHT maka dimungkinkan integrasi pipa dari Jawa Timur hingga Sumatera dikarenakan di KHT terdapat 2 jalur pipa eksisting yaitu ke arah Balongan dan ke arah Tegal Gede yang bisa diteruskan hingga Cilegon menyambung pipa SSWJ.



Potensi supply Pipa Cisem

- 1. Kelebihan supply dari Jawa Timur yang dapat dialirkan ke wilayah Jawa Barat sekitar 1,67 TCF atau sekitar 184 mmscfd (dari 14 WK), diharapkan dapat dilakukan shifting perencanaan produksi sepanjang masa operasi pipa Cisem.
- 2. Masih terdapat potensi sebesar 0,2 TCF atau 22 mmscfd yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di Jabar (total potensi demand 199 mmscfd).
- 3. Total potensi supply cisem tahap 2 sebesar 64 mmscfd. Namun masih dapat meningkat mengingat realisasi demand di Kendal dan Batang baru sekitar 10-28 mmscfd, masih di bawah asumsi demand Cisem tahap-1.

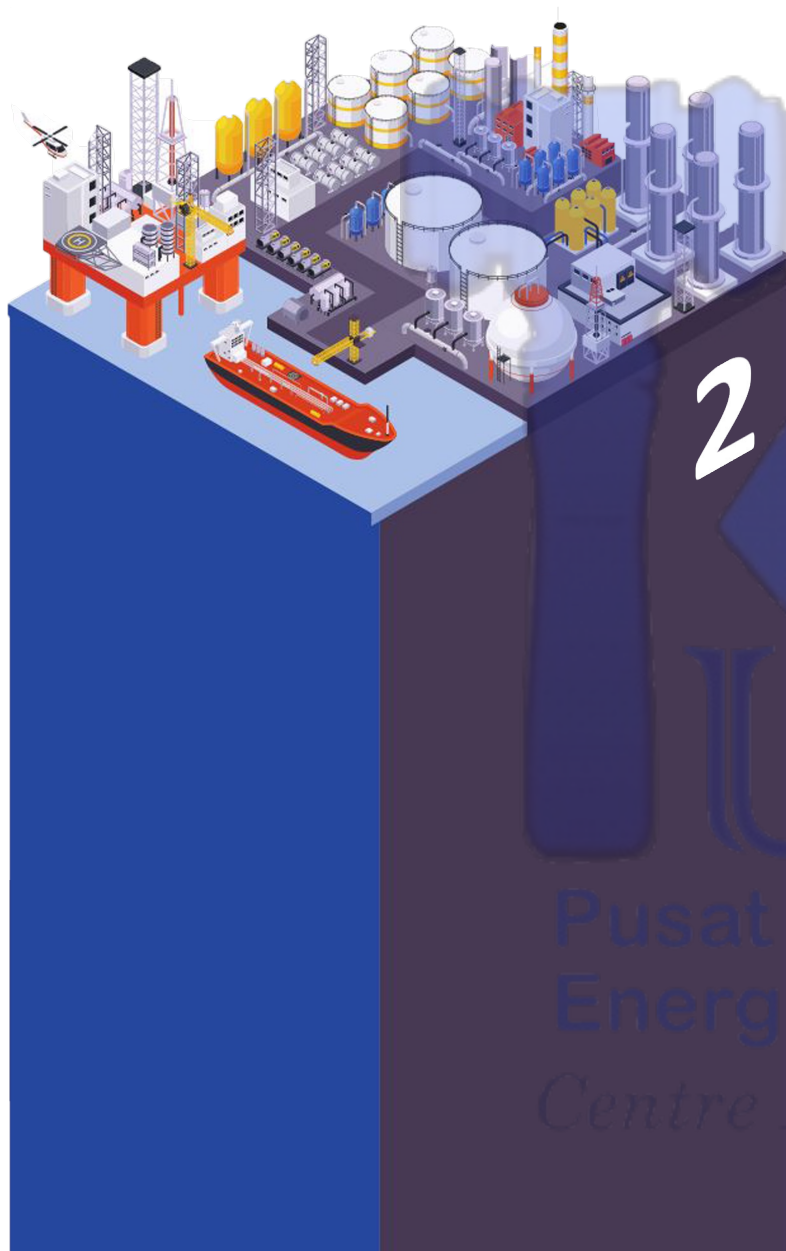


Potensi demand

jalur pipa Batang-Cirebon tahap 2

	Volume (mmscfd)	Keterangan
1 Industri	5,8-12	Industri di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang. Demand dari Kawasan Industri Brebes tidak dimasukan (menunggu kepastian status).
2 Komersial	0,3-0,7	Hotel dan Restaurant
3 Rumah tangga	5	Jargas KPBUC Cirebon
4 Kilang Balongan	24	- Sebagai anchor demand Cisem tahap-2 mulai 2024. Karena kontrak gas Kilang Balongan dengan PGN berakhir 2023 (Harga US\$ 12,5/mmbtu) - Berpotensi meningkat hingga 42 mmscfd (menggantikan supply dari PEP 10,3 mmscfd dan PHE 8 mmscfd)
Total 1-4 (skenario-A)	24-42	
5 Pembangkit listrik Jawa Barat	189-199	- Pembangkit Tanjung Priok, Muara Tawar dan Muara Karang, yang saat ini di supply dari LNG. - Sebagian demand ini bisa digantikan oleh gas Cisem tergantung ketersediaan supply gas.
Total 1-5 (skenario-B)	189-241	

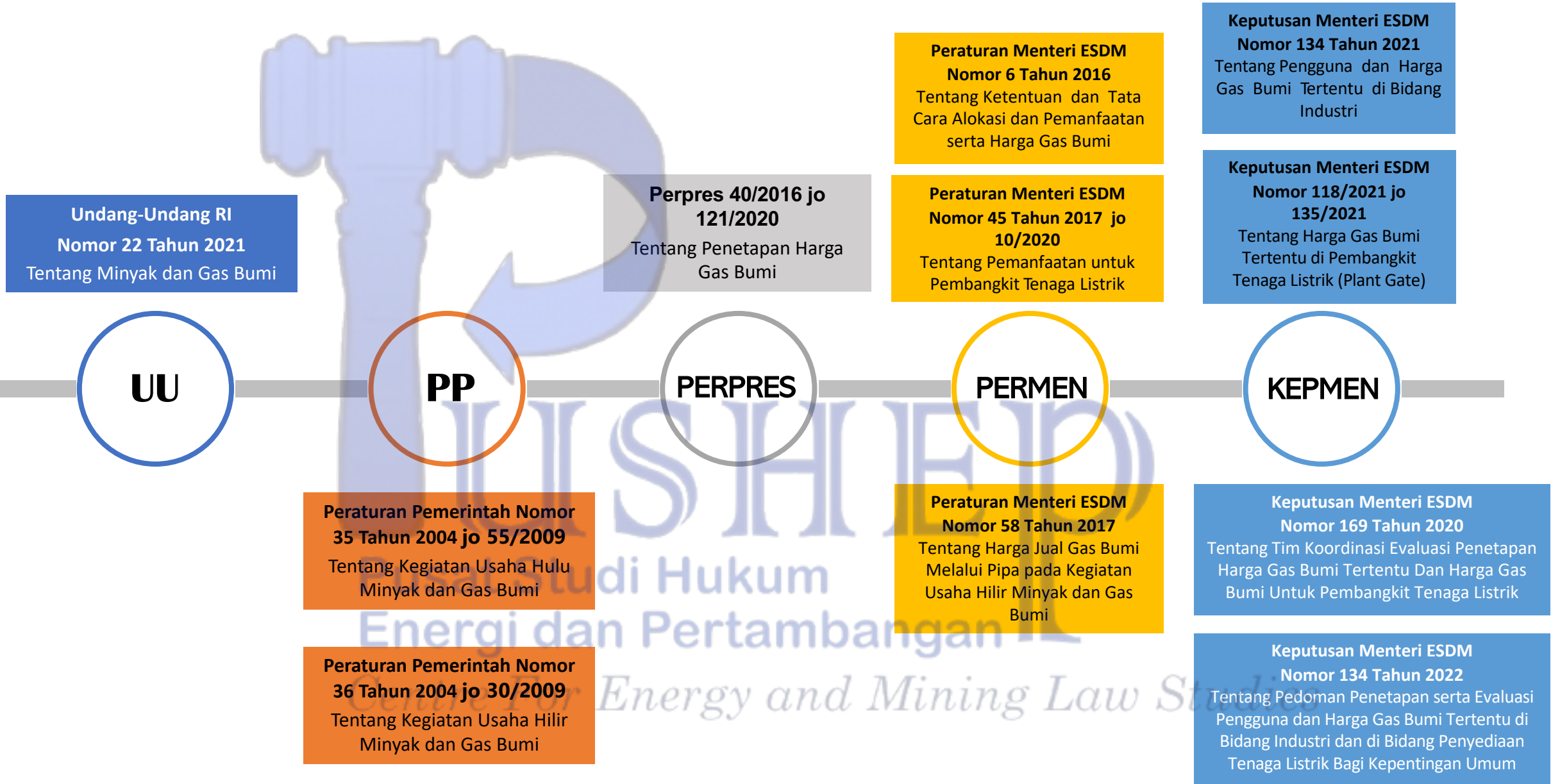




Progress Pembahasan Tata Cara Penetapan Pengguna HGBT di Bidang Industri

USHEP
Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

LANDASAN HUKUM PENGATURAN GAS BUMI INDONESIA



Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu didalam Permen ESDM No 15/2022

01

Pengguna Gas Bumi melakukan Permohonan Rekomendasi kepada Kemenperin

02

Kemenperin melakukan evaluasi terhadap permohonan pengguna gas bumi

03

Kemenperin menyampaikan Rekomendasi kepada Menteri ESDM sesuai dengan ketentuan

04

Menteri ESDM menugaskan Dirjen Migas, Kepala SKK Migas, Kepala BPMA, dan/atau Kepala Badan Pengatur untuk melakukan evaluasi

05

Menteri perindustrian dapat menyampaikan Rekomendasi kembali setelah melakukan perbaikan

Ketentuan Penyampaian Rekomendasi Calon Pengguna GBT

a. Data calon Pengguna GBT paling sedikit memuat:

1. nama perusahaan
2. alamat pabrik
3. bidang industri
4. total konsumsi energi per jenis energi
5. bukti pelaporan pelaksanaan manajemen energi
6. volume Gas Bumi sesuai PJBG yang berlaku;

b. hasil evaluasi atas perkiraan nilai tambah yang diberikan oleh calon Pengguna Gas Bumi Tertentu

c. hasil evaluasi atas kelayakan keekonomian industri yang disampaikan oleh calon Pengguna Gas Bumi Tertentu.

Hasil evaluasi atas perkiraan nilai tambah memuat:

- a. perkiraan kenaikan pajak;
- b. perkiraan kenaikan deviden;
- c. perkiraan penghematan subsidi jika ada;
- d. perkiraan peningkatan devisa;
- e. perkiraan penambahan tenaga kerja; dan
- f. rencana peningkatan investasi.

Terhadap pengguna Gas Bumi yang sebelumnya telah mendapatkan penetapan sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu, Rekomendasi memuat perkiraan dan rencana dan juga paling sedikit memuat mengenai:

- a. hasil evaluasi tahunan atas kesesuaian realisasi terhadap perkiraan dan rencana sebagaimana dimaksud
- b. penyerapan volume Gas Bumi.

Evaluasi paling sedikit terhadap:

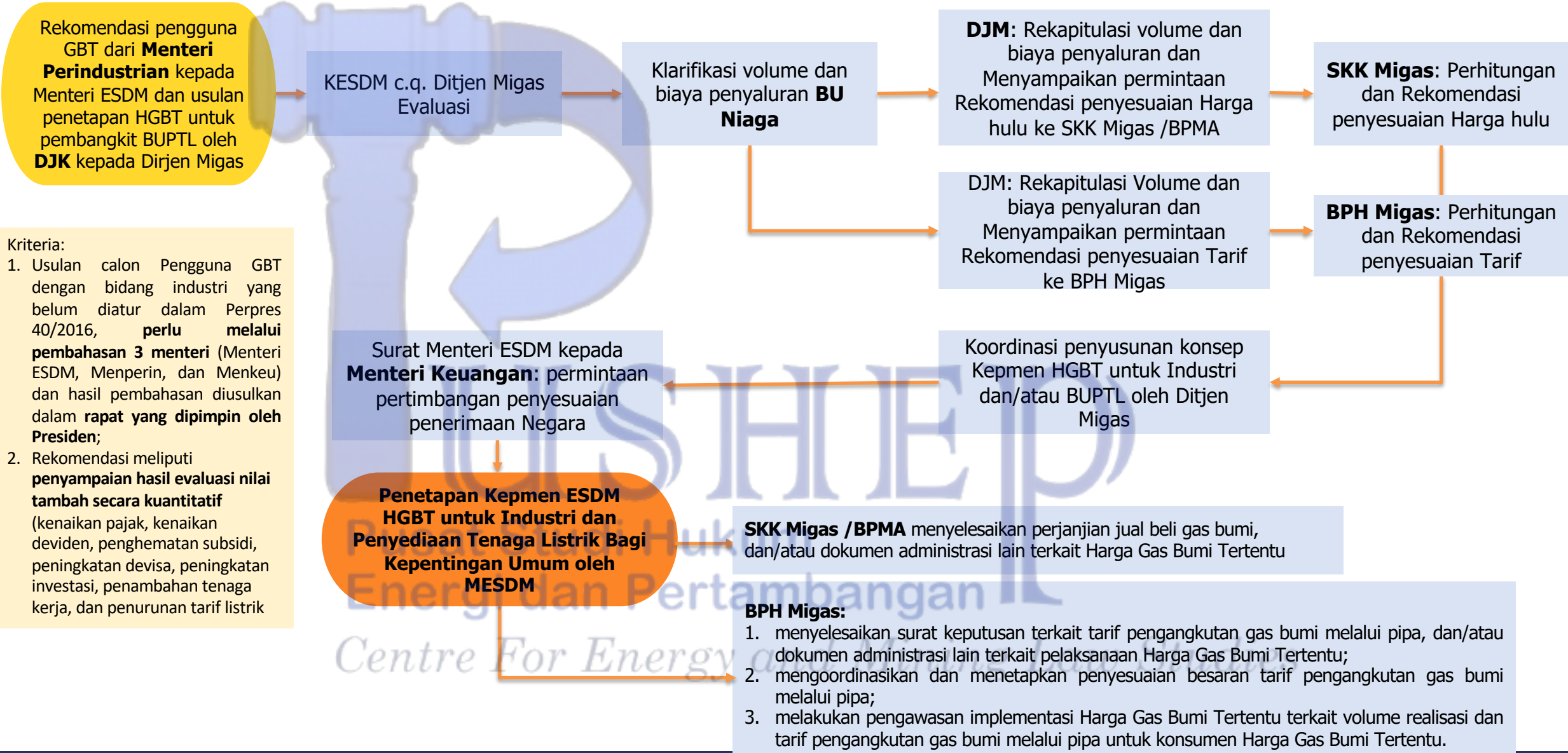
1. kelengkapan data dan kelengkapan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud;
2. ketersediaan volume Gas Bumi; dan
3. kecukupan penerimaan bagian negara

Berdasarkan hasil evaluasi:

- a. Dalam hal diperlukan penyesuaian terhadap perhitungan penerimaan negara, Menteri ESDM meminta pertimbangan kepada Menteri Keuangan
- b. Dalam hal data dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud tidak lengkap, Menteri ESDM melalui Dirjen Migas menyampaikan daftar calon pengguna Gas Bumi yang tidak dapat diproses kepada Kementerian Perindustrian
- c. Dalam hal terdapat ketidaktersediaan volume Gas Bumi dan/atau terdapat ketidakcukupan penerimaan negara, Menteri ESDM melalui Dirjen Migas menyampaikan kepada Kementerian Perindustrian



Pedoman Pemrosesan Penetapan Pengguna dan HGBT di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum berdasarkan ketentuan pada Kepmen 134/2022

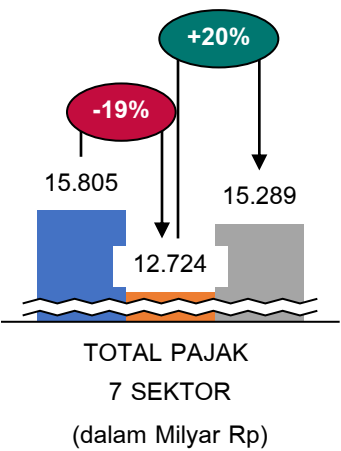


Kinerja Industri Penerima HGBT

“PERPAJAKAN”

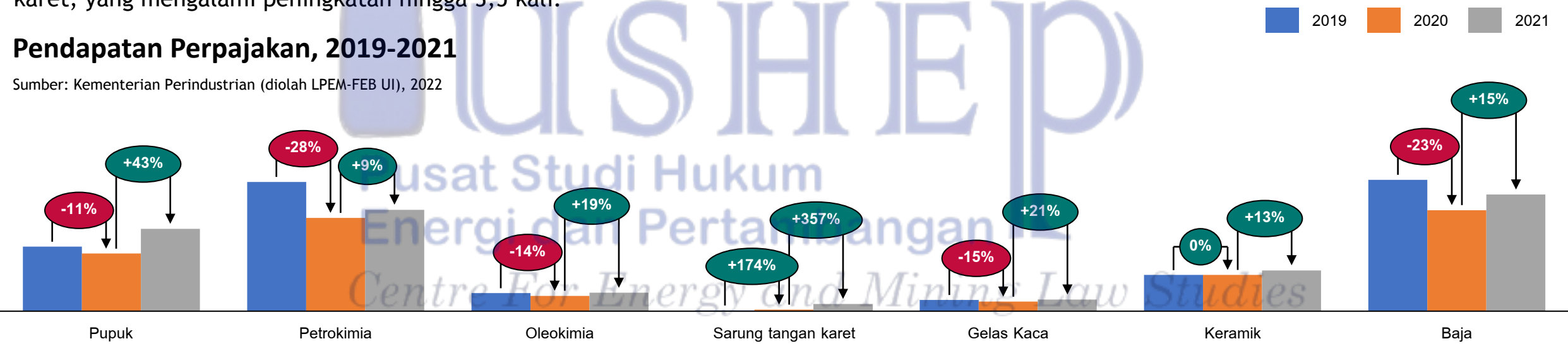
Apabila ditinjau dari variabel perpajakan, secara umum, pada tahun 2019-2020, terdapat penurunan pendapatan perpajakan sebesar -19% dari industri penerima kebijakan HGBT. Hal tersebut cukup relevan sebagai dampak dari pandemic COVID-19 yang menyebabkan adanya disrupsi di dalam perekonomian. Sementara itu, pada periode 2020-2021, yaitu ketika kebijakan HGBT di-implementasikan, terdapat peningkatan pendapatan perpajakan sebesar 20% dari industri penerima kebijakan HGBT. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan perpajakan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -3%.

Secara sektoral, industri sarung tangan karet dan keramik merupakan dua sektor yang mengalami pertumbuhan perpajakan yang positif pada tahun 2019-2020. Sementara itu, lima sektor penerima kebijakan HGBT lainnya mengalami pertumbuhan perpajakan yang bernilai negatif. Sementara itu, pada tahun 2021, **seluruh sektor industri penerima kebijakan HGBT mencatatkan pertumbuhan perpajakan yang bernilai positif**. Peningkatan terbesar berasal dari sektor sarung tangan karet, yang mengalami peningkatan hingga 3,5 kali.



Pendapatan Perpajakan, 2019-2021

Sumber: Kementerian Perindustrian (diolah LPEM-FEB UI), 2022



Kinerja Industri Penerima HGBT

“TENAGA KERJA”

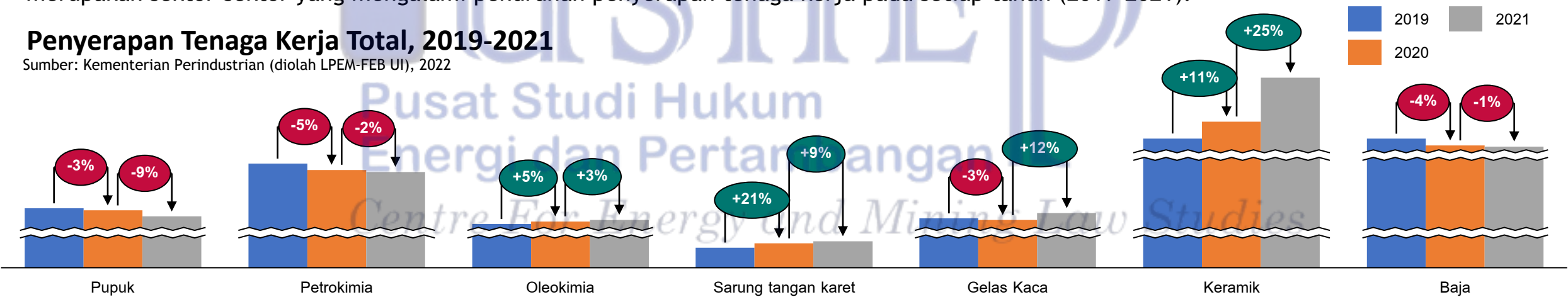
Variabel tenaga kerja digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan tingkat penyerapan tenaga kerja pada periode sebelum (2019-2020) dan saat kebijakan HGBT diberlakukan (2020- 2021). Pada konteks ini, variabel tenaga kerja terdiri atas tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat pada proses produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung ialah tenaga kerja yang pekerjaannya tidak terlibat langsung pada proses produksi.

Secara total, yaitu tenaga kerja langsung dan tidak langsung, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya (2019-2021) pada industri penerima kebijakan HGBT. **Pada tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 4.532 atau 1%** apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian, **pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja meningkat sebesar 7% atau sebesar 8.561** apabila dibandingkan dengan tahun 2020.

Secara sektoral, sektor oleokimia, sarung tangan karet, dan keramik merupakan sektor yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja pada setiap tahun (2019-2021). Industri keramik merupakan industri penerima kebijakan HGBT yang mencatatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar apabila dibandingkan dengan industri penerima kebijakan HGBT lainnya. Sementara itu, sektor pupuk, petrokimia, dan baja merupakan sektor-sektor yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja pada setiap tahun (2019-2021).

Penyerapan Tenaga Kerja Total, 2019-2021

Sumber: Kementerian Perindustrian (diolah LPEM-FEB UI), 2022





DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Thank You

www.migas.esdm.go.id

For news update and information about Oil & Gas Sectors

Follow our social media:



Halo Migas
Ditjen Migas



@halomigas



@halomigas



Halo Migas
Ditjen Migas



Address

GEDUNG IBNU SUTOWO
JL. H.R RASUNA SAID KAV. B-5,
JAKARTA 12910



www.migas.esdm.go.id



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas



@halomigas



Halo Migas Ditjen Migas



Contact Center ESDM 136

16